

SIARAN PERS

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara

No. 026/2022 tanggal 08 November 2022

INDONESIA DAN ADB LUNCURKAN KAJIAN *LOCALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS* UNTUK IBU KOTA NUSANTARA DI COP27

SHARM EL SHEIKH, MESIR - Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) hari ini meluncurkan kajian ruang lingkup (*scoping study*) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi kota netral karbon pada 2045.

Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam *nationally-determined contributions* (NDCs) sejalan dengan Kesepakatan Paris.

“Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim,” ungkap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono. “Kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi kami untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.”

Kajian ini mengindikasikan bahwa pembangunan Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan akan mendorong upaya rehabilitasi yang lebih ambisius di kawasan IKN. Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65% dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (*net sink*) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.

Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060 dan pencapaian *net sink* di sektor lahan pada 2030, yang selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris. Kajian ini merupakan analisis komprehensif pertama terkait *regionally and locally-determined contributions* di tingkat kota di Indonesia.

“Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten—yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional—sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris,” ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed. “ADB senang dapat membantu Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengambil satu langkah tegas dalam perang melawan perubahan iklim.”

Kajian ini lebih jauh mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166.000 hektar kawasan hutan IKN. Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).

Kajian ini juga mencatat bahwa pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80% energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80% penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum.

Otorita IKN, yang dibentuk pada Maret 2022, merupakan lembaga setingkat kementerian. Otorita IKN bertugas menangani persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota, serta menjadi penyelenggara kota tersebut.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Sidik Pramono

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN

Telp. 0811 196 028

Website : ikn.go.id
Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua

#Nusantara

#IbuKotaNegara

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyebutan untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang merupakan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tertanggal 28 April 2022 dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.